

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstelasi politik di Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi pada implementasinya menjadikan partai politik sebagai unsur penting dalam bidang politik. Memasuki era reformasi sistem pemilihan umum (pemilu) lebih menuntut partai-partai agar lebih kompetitif. Tidak adanya partai hegemonik juga kembalinya Indonesia pada sistem multi partai memberikan kesempatan berdirinya partai-partai baru.¹

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satu parameter untuk melihat demokratis atau tidaknya suatu negara yaitu dengan adanya pemilihan umum, bahkan secara global pemilihan umum menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pergantian kepemimpinan secara berkala.

Schumpeter juga mengemukakan bahwasanya pemilu merupakan arena yang mewadahi kompetisi antara para pelaku politik untuk meraih kekuasaan, kebebasan masyarakat dan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan. Pada akhirnya semua bersepakat bahwa tidak ada negara yang demokratis apabila tidak menyelenggarakan pemilihan umum terlepas dari kualitas pelaksanaannya apakah baik ataupun buruk².

¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, "Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", Jakarta, PT Rajagrafindo Persada (2015), hlm 122.

² Schumpeter dalam tulisan Daud M. Liando, "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)". Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 Edisi Oktober, hlm.14-28

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, terdapat beberapa jenis pemilu yakni, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan legislatif. Pemilihan umum legislatif merupakan sarana kedaulatan rakyat yang di laksanakan dengan sistem luber yaitu(langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan jujur (jujur dan adil) untuk memilih wakil yang akan mewakili rakyat di parlemen baik itu tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Partai politik merupakan peserta dalam pemilihan umum. Tanpa partai politik para calon wakil rakyat tidak bisa ikut dalam kontestasi pemilu legislatif karena partai berperan penting dalam pemilihan legislatif, berbeda dengan pilkada yang bisa melalui jalur independen atau perseorangan dan pada pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) yang memang tidak memerlukan partai politik. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya partai politik merupakan “kendaraan” politik bagi seorang calon legislator atau yang kita kenal dengan wakil rakyat atau caleg. Adanya sebuah partai politik di Indonesia menjadi sebuah kompetisi demokrasi yang menjadi alat tampung suara aspirasi rakyat. Kesetaraan berbagai kalangan terlihat dalam pemilihan umum, adanya kendali dari rakyat dalam suara mayoritas menjadi dasar tujuan untuk menjadi negara indonesia menjadi lebih baik kedepannya. Partai politik juga merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara³.

³ Brilly, Muhammad, dan Cut Maya Aprita Sari. “Kegagalan Partai Golongan Karya Dalam Memperoleh Kursi Legislatif Di Kabupaten Pidie Jaya Pada Pemilu Tahun 2014.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 4, no. 3 (2019): 1–12.

Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada, kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa di katakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda di dibandingkan dengan organisasi negara, dan ia baru ada di negara modern⁴.

Partai politik setidaknya dapat di definisikan sebagai suatu organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu, melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu di peroleh melalui pemilihan umum atau pemilu, sehingga tepat kiranya bahwa instrumen partai politik untuk meraih kekuasaan adalah dengan pemilihan umum, sehingga unsur tujuan kekuasaan dalam diri partai politik di fasilitasi oleh pemilihan umum. Dalam paradigma kontemporer partai politik tidak hanya sekedar sebagai organisasi yang berorientasi kekuasaan, tetapi sekaligus bertujuan pada kepentingan rakyat banyak.

Dalam Partai politik terdapat kumpulan orang-orang yang terorganisir yang memiliki tugas dan fungsi, tujuan bersama, visi dan misi, program yang pada akhirnya menguasai pemerintahan, dengan cara menduduki jabatan politik, partai politik juga menjadi media penghubung atau perantara antara masyarakat dengan pemerintah, yaitu dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat⁵. Salah satu yang membedakan antara

⁴ Budiardjo, Miriam. "Dasar-dasar Ilmu Politik". Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008, Hlm 30

⁵ Sri Handayani RW, dan Fais Yonas Bo'a. "Partai Politik dan Pemilu dalam Lintasan Sejarah". Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2019. Hlm 106

parpol dengan organisasi lainnya yaitu, adanya tujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan. Secara sederhana dapat di pahami bahwa apabila suatu organisasi memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dalam pemerintahan, maka organisasi tersebut dapat di katakan sebagai parpol. Untuk dapat mempertahankan kekuasaan itu, parpol harus mempunyai pengaruh dan masa pendukung sebanyak mungkin.

Sistem kepartaian rasanya tepat di terapkan guna mengakomodir banyak kepentingan rakyat indonesia yang rasanya tidak mungkin di jalankan hanya satu atau dua partai, sehingga dalam praktek pemilihan umum di Indonesia di jumpai banyak partai politik sebagai peserta pemilu. Salah satu partai yang ikut dalam pemilihan umum legislatif pada 2019 adalah Partai Hati Nurani Rakyat, Partai ini bisa di katakan partai yang relatif masih baru dalam kancah perpolitikan di negeri ini terhitung baru 3 kali partai yang di dirikan oleh mantan purnawirawan Jend. Wiranto ini mengikuti pemilu yakni pada tahun 2009, 2014 dan pada tahun 2019. Pada pemilu legislatif tahun 2014 Partai Hanura berhasil mengantarkan 16 wakil mereka ke parlemen dan berhasil memperoleh suara parlemen sebesar 5, 26 %⁶.

Pada tahun 2016 Presiden joko widodo menunjuk ketua umum Partai Hanura sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, sehingga mengharuskan partai Hanura mencari pimpinan baru, melalui Munaslub terpilihnya Osman sapta Odang (OSO) secara aklamasi untuk menggantikan posisi wiranto sebagai ketua umum Partai Hanura. Dalam

⁶ *Ibid*, Sri Handayani RW, dan Fais Yonas Bo'a. Hlm 110.

perjalanan kepemimpinan Osman Sapta Odang banyak menuai Konflik, salah satunya adalah konflik yang terjadi dengan Sekjen Partai Hanura Sariffudin Suding⁷.

Tabel.1.1
Perbandingan Dinamika Dua Kubu Kepemimpinan Dalam Partai Hanura

Kubu Suding	Kubu OSO
➤ Caleg dan kandidat Pilkada kena mahar	➤ Tidak ada mahar, tetapi sumbangan suka rela
➤ OSO otoriter	➤ Sudding cs tak paham berorganisasi
➤ SK ganda soal kandidat Pilkada	➤ Sudding cs gelapkan jabatan
➤ Dana dimasukkan ke OSO Securities	➤ Kandidat berpotensi didanai partai

Sumber : (Beritasatu.com, 2018)

Melihat dinamika yang terjadi tentu ini sangat memprihatinkan karna di tengah kesibukan kelompok atau partai Lain mempersiapkan diri dengan konsolidasi politik menjelang Pemilu 2019, partai Hanura justru sibuk mementingkan ego masing-masing yang tentunya akan berdampak pada perolehan suara partai pada pemilu 2019. Di sisi lain pemilu yang di dakan serentak dari Presiden dan wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten seakan memberikan sinyal ketidakpercayaan ketua Umum partai Hanura Usman Sapta Odang karna, bukannya mencalonkan diri melalui Partai Hanura, Oso malah mendaftarkan diri melalui DPD.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersamaan dengan pemilu Legislatif juga tak memberikan efek bagi partai Hanura (*Coattail Efect*) mengingat Presiden dan Wakil Presiden yang di usung oleh Partai Hanura

⁷ beritasatu.com. “Dinamika Dua Kubu Kepemimpinan Dalam Partai Hanura” Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/474025/pemilu-2019-mendagri-harapkan-parpol-solid> Pada 16 Juli 2023. Pukul 09.57 WIB.

yakni Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin berhasil keluar sebagai Pemenang, karena pada dasarnya *Coattail Effect* hanya berdampak pada Partai yang mencalonkan kadernya sendiri, bagi partai yang hanya menjadi pendukung tentu hanya dapat mengandalkan Basis suara mereka sendiri⁸. Konflik yang terjadi di internal partai memberikan dampak besar bagi hasil partai Hanura Pada pemilu legislatif tahun 2019. Partai Hanura tidak berhasil melewati ambang batas parlemen threshold sebesar 4% yang berakibat pada tidak ada wakil dari Partai Hanura di tingkat nasional. Partai Hanura hanya memperoleh suara sebesar 2.161.507 atau 1,54%⁹.

Kekalahan di tingkat pusat ini juga berimbas pada perolehan Partai Hanura di sebagian daerah juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, salah satunya adalah Partai Hanura Provinsi Jambi. Pada tingkat DPRD Provinsi Jambi Hanura hanya memperoleh 2 Kursi dan Hanura hanya mampu membentuk fraksi bersama partai NasDem. Namun kali ini penulis akan membahas Partai Hanura yang berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dimana Hanura gagal memperoleh kursi dari tahun sebelumnya Hanura mampu mengisi kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun dengan peningkatan di dua periode namun harus gagal memenuhi ambang batas 4% pada parlemen DPRD Kabupaten Sarolangun. Berikut penulis rincikan historis ketercapaian partai Hanura dari masa pendatang baru sejak 2009 hingga pemilu saat ini.

⁸ rumahpemilu.org. "*Coattail Effect Jokowi-Ma'ruf terhadap PDIP dan Partai-Partai Pengusung*" Diakses dari <https://rumahpemilu.org/coattail-effect-jokowi-maruf/> Pada 16 Juli 2023 Pukul 10.22 WIB.

⁹ Wahyu Herianto Ardi, "*Faktor Kegagalan Partai Hanura pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Lombok Utara.*". (Skripsi UMY tahun 2022). Hlm. 5

Tabel. 1.2
Perolehan Kursi Partai HANURA Pada DPRD Kabupaten Sarolangun
Dari Tahun 2009-2019.

Pemilu 2009-2014	Pemilu 2014-2019	Pemilu 2019-2024
1 Kursi	3 Kursi	0 Kursi

Sumber : KPU Kabupaten Sarolangun 2019

Tabel. 1.3
Perolehan Suara Partai HANURA Pada DPRD Kabupaten Sarolangun
Dari Tahun 2009-2019.

Pemilu 2009-2014	Pemilu 2014-2019	Pemilu 2019-2024
4.197 Suara	9.541 Suara	2.880 Suara

Sumber : KPU Kabupaten Sarolangun 2019

Penulis kemudian menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktoryang menjadi penyebab penurunan suara dan kegagalan Partai Hanura pada pileg di Kabupaten Sarolangun tahun 2019 berdasarkan data diatas. Pemilihan Hanura Sarolangun sebagai objek penelitian penulis adalah *pertama* suara partai yang turun drastis berikut dengan keterperolehan kursinya, walaupun beberapa wilayah juga mengalami hal yang sama tidak memiliki keterwakilan atau mengalami penurunan.

Kedua yang paling mendasari penulis dalam memilih penelitian ini adalah penulis melihat dari sudut pandang pelembagaan partai politik, jika di tempat lain mengalami penurunan suara atau tidak memeneuhi keterperolehan kursi. Di Kabupaten Sarolangun Hanura juga dinyatakan sebagai salah satu partai yang tidak mengikuti Pemilu tahun 2024. Bukan karena tidak memenuhi verifikasi KPU namun kepengurusan Hanura Kabupaten

Sarolangun sudah tidak ada, hal ini dinyatakan langsung oleh mantan ketua DPC Hanura Sarolangun saat di wawancarai penulis.

Sebagaimana Tomsa (2012) menyebutkan, karakteristik partai politik di Indonesia terklarifikasi sebagai partai elektoralis¹⁰. Klasifikasi ini menempatkan aktivitas partai hanya terpusat pada momen Pemilihan Umum (pemilu) sebagai satu-satunya sasaran penting dalam rangkaian organisasi sehingga hasil suara kontestasi elektoral dalam pemilihan merupakan tolak ukur keberhasilan pada sebuah partai politik. Klasifikasi seperti ini kemudian menjadi dasar penulis untuk mengkategorikan.

Partai Hanura sebagai partai baru yang mana Hanura lahir pada era setelah reformasi dan seharusnya Hanura mampu terus eksis seperti Partai-partai yang lahir bersamaan seperti, Gerindra, Demokrat dan NasDem. Namun Hanura gagal dalam konteks kontestasi pileg 2019 di Kabupaten Sarolangun¹¹. Penulis juga menganggap penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui instrumen apa saja yang dibutuhkan partai khususnya partai yang tergolong cukup baru untuk bisa menang dan terus mampu menggapai ambang batas parlemen baik di DPRD tingkat Kabupaten ataupun Provinsi.

Kemudian penulis menampilkan data pada 2 periode pemilihan legislatif Kabupaten Sarolangun yakni pada periode 2014-2019 periode dimana Hanura berhasil memperoleh 3 kursi keterwakilan di DPRD Sarolangun dengan perolehan suara yang cukup baik, dengan perbandingan perolehan suara Pileg

¹⁰ Dirk Tomsa, *“What Type of Party? Southeast Asian Parties Between Clientelism and Electoralism..”* (2012).

¹¹ *Ibid*, Hatta Abdi dkk, Hlm 100

periode 2019-2024 dimana Hanura gagal mempertahankan pencapaian sekaligus melakukan peningkatan justru malah gagal masuk ambang batas parlemen dan mengalami kekalahan dan penurunan suara yang cukup telak sehingga pada periode 2019-2024 Hanura tidak memiliki keterwakilan di DPRD Sarolangun.

Permasalahan dan dinamika keterperolehan pada kekalahan partai Hanura Sarolangun dalam pemilu 2019 lalu, pada penjelasan yang di jelaskan penulis diatas di jelaskan pada data berikut, data yang ditampilkan pada informasi berikut di peroleh oleh peneliti melalui website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun, sehingga dugaan dan asumsi penulis dapat di benarkan berikut data tersebut disajikan sebagai berikut :

Tabel. 1.4
Perolehan Suara Partai Politik Pileg Kabupaten Sarolangun Tahun 2014¹²

No.	Partai	Jumlah Suara
1.	Golkar	25.730
2.	PDI-P	21.616
3.	Demokrat	16.524
4.	Gerindra	16.132
5.	PKS	14.202
6.	NasDem	13.615
7.	PPP	13.339
8.	PKB	11.987
9.	PAN	9.856
10.	Hanura	9.541
11.	PKPI	5.205
12.	PBB	3.072

*Warna Kuning merupakan Suara perolehan partai Hanura

Sumber : KPU Kabupaten Sarolangun 2019

¹² KPU Kabupaten Sarolangun, "Pengumuman Hasil Pemilu Kabupaten Sarolangun Tahun 2014,2019". Diakses dari <https://kab-sarolangun.kpu.go.id/> Pada 05 Juli 2023. Pukul 19.08 WIB. {Data diolah Oleh Penulis}

Tabel. 1.5
Perolehan Suara Partai Politik Pileg Kabupaten Sarolangun Tahun 2019

No.	Partai	Jumlah Suara
1.	Golkar	35.984
2.	Demokrat	19.060
3.	PDI-P	18.900
4.	PPP	17.319
5.	PKS	16.321
6.	PKB	15.766
7.	Gerindra	14.296
8.	PAN	10.069
9.	Perindo	6.060
10.	NasDem	4.207
11.	Hanura	2.880
12.	Berkarya	1.643
13.	PBB	224
14.	PSI	172
15.	PKPI	0
16.	Garuda	0

*Warna Kuning merupakan Suara perolehan partai Hanura

Sumber : KPU Kabupaten Sarolangun 2019

Dari fenomena yang telah penulis paparkan diatas penulis merasa perlu untuk dilakukan kajian dan analisis mengenai kegagalan yang dialami Partai Hanura pada pileg 2019 di Kabupaten Sarolangun, apa lagi Hanura pada pileg tahun lalu di salib atau di ungguli oleh Partai yang lebih baru yakni Perindo yang berhasil memperoleh 1 Kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun. Perlu adanya kajian lebih lanjut agar permasalahan yang di temukan penulis pada kasus partai hanura ini menjadi pelajaran bagi partai lainnya pada masa mendatang.

Kegagalan partai politik merupakan fenomena politik yang di sebabkan oleh beberapa faktor seperti yang dijelaskan pada Penelitian terdahulu. *Pertama*, penelitian dari Muhammad Brilly dan Cut Maya Aprita Sari yang

berjudul “Kegagalan Partai Golongan Karya Dalam Memperoleh Kursi Legislatif di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014”¹³. Partai Golongan Karya di Kabupaten Pidie Jaya merupakan satu-satunya yang gagal memperoleh kursi legislatif pada Pemilu tahun 2014 dari semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor-faktor kegagalan Partai Golongan Karya dalam memperoleh kursi legislatif di Kabupaten Pidie Jaya pada Pemilu tahun 2014 adalah disebabkan kurang populernya calon legislatif yang diusung, minimnya dana kampanye calon legislatif, minimnya penggunaan atribut kampanye, dan tidak menjalin komunikasi dengan pemilih.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang tengah di susun oleh penulis adalah sama-sama pada objek penelitian yakni partai politik yang gagal dalam memperoleh kursi DPRD. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan teori dalam penulisan penelitian tersebut menggunakan teori *branding* politik dan komunikasi politik sedangkan pada penelitian yang sedang di tulis oleh penulis menggunakan teori pelebagaan politik dengan konsep kegagalan partai dari faktor internal dan eksternal.

Kedua, penelitian yang sama diteliti sebelumnya oleh Hatta Abdi dkk, yang berjudul “Kegagalan Partai Politik Baru Di Provinsi Jambi pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019”¹⁴. Penelitian ini menjelaskan bahwa masalah pelebagaan dan tokoh dapat saling terkait. Karena hubungan partai

¹³ Muhammad Brilly dan Cut Maya Aprita Sari, “Kegagalan Partai Golongan Karya Dalam Memperoleh Kursi Legislatif Di Kabupaten Pidie Jaya Pada Pemilu Tahun 2014” (2019), hlm 1.

¹⁴ Dalam Hatta Abdi, dkk, “Kegagalan Partai Politik Baru Di Provinsi Jambi Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019” no. 2 (2020), hlm 97.

dengan arena pemilu tidak dapat dipisahkan, maka perlu adanya figur sebagai variabel penguat dalam hal kontestasi politik khususnya partai baru di Provinsi Jambi. Masalah yang muncul dari partai-partai baru di Provinsi Jambi adalah tidak bisa menang dalam pemilu 2019. Penelitian ini kemudian menjadi rujukan penelitian ini dalam konteks untuk melihat bagaimana perjalanan politik partai baru di ranah Kota Jambi.

Persamaan pada penelitian yang di tulis oleh Hatta Dkk dengan penelitian yang di tulis oleh penelitian yakni pada penggunaan teori pelebagaan politik dengan meneliti kekuatan pada pelebagaan partai politik sehingga mengalami kekalahan. Sedangkan pada perbedaannya pada objek penelitian, penelitian ini hanya terfokus pada satu partai yang bukan partai politik baru namun telah memiliki rekam jejak keterperolehan kursi di DPRD Sarolangun namun di periode 2019-2024 mengalami kegagalan. Sedangkan pada penelitian terdahulu kedua ini fokus pada pelebagaan beberapa partai politik yang baru menjejaki pemilu.

Ketiga Penulis mencantumkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Herianto Ardi, dengan judul penelitian “Faktor Kegagalan Partai Hanura pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Lombok Utara”¹⁵. Berdasarkan hasil penelitian kegagalan partai Hanura khususnya di Kabupaten Lombok Utara di sebabkan oleh beberapa hal di antaranya adalah, faktor sistem rekrutmrn calon atau kandidat yang tidak terstruktur karna di lakukan menjelang pemilihan. Selain itu kualitas kandidat atau calon partai hanura sangatlah tidak mempuni

¹⁵ *Op.Cit.* Wahyu Herianto Ardi. Hlm. 18

karna di rekrut menjelang hari pemilihan yang berakibat pada kurang kenalnya masyarakat dengan calon partai hanura.

Untuk persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang tengah di susun oleh penulis adalah sama-sama pada objek penelitian yakni partai politik yang gagal dalam memperoleh kursi DPRD dan sama meneliti pada partai Hanura. Untuk perbedaan pada penelitian ketiga ini yakni penelitian ketiga menganalisis atau meneliti kegagalan partai melalui pola rekrutmen pada calon atau kandidat caleg. Sedangkan penelitian ini fokus pada pelebagaan partai politik tersebut.

Penulis merasa perlu untuk mencoba dan menghadirkan sudut pandang yang baru di tengah beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pelebagaan dengan menganalisis indikator pelebagaan secara menyeluruh untuk mengkaji kegagalan Partai Hanura pada Pileg di Kabupaten Sarolangun tahun 2019. Pelebagaan partai politik adalah Adaptabilitas dan kekokohan sistem kepartaian dalam menyerap dan menyatukan kekuatan sosial modern dengan memantapkan sikap dan perilaku politik. Berdasarkan pemaparan fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka menjadi layak dan menarik untuk untuk menjadi sebuah penelitian dengan judul, ***“Analisis Kegagalan Partai Hati Nurani Rakyat Pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sarolangun Tahun 2019”***.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui uraian diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana kekuatan pelembagaan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sarolangun sehingga gagal pada pemilihan legislatif Kabupaten Sarolangun tahun 2019?
- 1.2.2 Apa saja faktor yang menjadi penyebab kegagalan Partai Hanura Kabupaten Sarolangun dalam pemilihan legislatif tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menjelaskan bagaimana pelembagaan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada pileg Kabupaten Sarolangun tahun 2019 sehingga mengalami kegagalan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kegagalan Partai Hanura Kabupaten Sarolangun pada pemilihan legislatif tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk kepentingan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang akademis khususnya dalam hal konsepsi pada literatur Ilmu Politik, misalnya dalam menganalisis mengenai faktor penyebab gagalnya sebuah partai dalam pemilu legislatif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk dapat memperkaya informasi mengenai dinamika partai politik dalam pemilu legislatif serta bahan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi partai politik lain.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Pelembagaan Partai Politik

Setidaknya terdapat beberapa ilmuwan politik yang membahas konsep pelembagaan secara mendasar. Huntington (1968) dalam bukunya *“Political Order in Changing Societies”* yang membahas pelembagaan secara lebih luas. Dalam suatu organisasi dapat dikatakan terlembaga apabila nilai yang diusung oleh suatu organisasi dapat diterima oleh masyarakat¹⁶. Huntington juga memberikan empat dimensi kelembagaan dalam melihat organisasi; kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi dan koherensi.

¹⁶ Dalam Hatta Abdi, dkk, *“Kegagalan Partai Politik Baru Di Provinsi Jambi Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019”* no. 2 (2020), hlm 98.

Kemampuan beradaptasi diartikan sebagai kemampuan bertahan hidup suatu organisasi. Dalam kerangka fungsional, bagaimana organisasi dapat beradaptasi dengan kelompok yang mereka wakili. Kompleksitas organisasi diukur melalui jumlah sub-unit. Otonomi mengacu pada dimensi diferensiasi dari pengelompokan sosial dan metode perilaku. Koherensi berkaitan dengan konsensus dalam suatu organisasi, misal, dalam penyelesaian konflik¹⁷.

Tulisan Dirk Tomsa (2008) yang berjudul "*Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Soeharto Era*" menjelaskan pelebagaan Partai Golkar dengan menggunakan konsep institusionalisasi Randall dan Svasand¹⁸. Pelebagaan Golkar semenjak runtuhnya Soeharto dianggap paling stabil daripada partai besar lainnya. Tomsa melihat dari dimensi *systemness* dan *reification*, aspek yang dilihat adalah keberhasilan terkait fungsi maupun penyelesaian konflik yang dijalankan dan penerimaan publik terhadap parpol.

Dari penjelasan di atas kemudian menginspirasi penulis dalam memahami kelembagaan partai politik di Indonesia khususnya di Kabupaten Sarolangun. "Pelebagaan partai politik diartikan sebagai proses pemantapan partai politik. Dengan terlebagnya partai politik tersebut kemudian bisa menjadi lebih dari sekedar organisasi. Dalam menganalisis hasil temuan data yang diperoleh, penulis menggunakan teori pelebagaan partai politik Vicky Randall dan Svasand dimana dalam

¹⁷ *Ibid*, Hatta Abdi,

¹⁸ Dirk Tomsa, *Party Politics and Democratization in Indonesia*, Party Politics and Democratization in Indonesia (New York: Routledge., 2008).

tulisannya membagi pelebagaan partai dapat dikategorisasikan menjadi dua faktor; faktor internal dan eksternal. Lebih lanjut kategori yang dibuat keduanya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.5.1
Pelebagaan Partai Menurut Randal dan Svasand

Dimensi Kepartaian	Internal	Eksternal
<i>Structural</i> (Struktural)	<i>Systemness</i> (Kesisteman)	<i>Decisional Autonomy</i> (Otonomi Keputusan)
<i>Attitudinal</i> (Kultural)	<i>Value Infusion</i> (Identitas)	<i>Reification</i> (Citra Pada Publik)

Sumber : Vicky Randall dan Lars Svasand, data olahan

Proses pelebagaan ini terdapat dua aspek yakni aspek internal-eksternal dan aspek *structural-attitudinal*. Kedua aspek tersebut kemudian mengalami penyilangan sehingga, hasil dari penyilangan kemudian menjadi indikator yang menentukan partai terlembaga dengan baik atau tidak (Lihat Tabel 1) telah penulis olah melalui analisa sendiri.

Systemness sendiri adalah istilah yang diambil dari Panebianco yang merupakan peningkatan ruang lingkup, kepadatan dan keteraturan yang membentuk partai sebagai sebuah struktur¹⁹. Suryana dkk (2020) menyatakan, “dimensi ini dijelaskan mengenai fungsi-fungsi partai politik (fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pema-

¹⁹ Vicky Randall dan Lars Svåsand dalam Dirk Tomsa, *Party Politics and Democratization in Indonesia, Party Politics and Democratization in Indonesia* (New York: Routledge., 2008).

kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik dan kontrol politik)”²⁰.

Value infusion atau infusi nilai berkaitan dengan identitas partai politik yang berdasarkan ideologi partai. Indikator dari dimensi ini adalah hubungan partai politik berkaitan dengan kelompok tertentu, dalam hal ini ketergantungan partai politik dengan kelompok sosial tertentu²¹. Kemudian pengaruh klientisme dalam organisasi dimana dalam hubungan antara partai dengan anggota bersifat instrumentalis (didasarkan pada materi) atau bersifat ideologis (berdasarkan ideologi yang diterapkan oleh partai politik).

Dimensi yang terakhir adalah *reification*, hasil penyilangan antara aspek eksternal dan *attitudinal* yang melihat bagaimana imajinasi publik terhadap suatu partai dimaknai sebagai faktor pendorong dalam preferensi politiknya. Kemampuan partai untuk menempatkan dirinya dalam benak publik dilihat dari historitas partai dan nilai-nilai simbolik yang berhasil mengklaim dirinya sebagai perwakilan masyarakat.

1.5.2 Faktor Penyebab Kegagalan Partai Politik Dalam Pemilu

Sebagaimana Turtiantoro dan Susilo Utomo 2013 dalam penelitiannya menyimpulkan kegagalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten Batang disebabkan oleh gagapnya PKS dalam menganalisis faktor internal dan faktor eksternal

²⁰ Suryana, Nanang dkk, “*Pelebagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019*” (Universitas Padjadjaran). 2020

²¹ *Ibid*, Suryana, Nanang dkk

partai yang pada akhirnya menjadi penyebab gagalnya PKS, diantaranya sebagai berikut ²²:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor kegagalan yang disebabkan oleh partai itu sendiri yang berimbas kepada perolehan suara di dalam pemilihan, hal- hal tersebut diantaranya.

1) Strategi Partai Politik

Strategi adalah salah satu kunci keberhasilan suatu partai untuk memenangkan pemilihan umum, jika partai tersebut salah mengambil langkah ataupun strategi maka bisa menjadi pukulan kepada partai tersebut. Beragam strategi yang bisa dilakukan oleh partai demi merebut hati para pemilihnya antara lain, strategi penempatan caleg, strategi komunikasi partai atau caleg kepada konstituen dan sebagainya.

2) Kader Partai

Kader partai sangat mempengaruhi sejauh mana keberhasilan partai dalam kontestasi pileg. Partai politik harus mempersiapkan kader – kader terbaik yang ingin bertarung di pentas politik pemilu legislatif yang mampu mengakomodir dan membela kepentingan rakyat sehingga partai tersebut mampu mendulang suara dari para masyarakat. Partai politik harus mempersiapkan kader yang mampu terus bersosialisasi kepada masyarakat dan mampu memobilisasi

²² Turtiantoro, L. D., & Utomo, M. D. S. “*Analisis Kegagalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Memperebutkan Kursi di Dprd Kabupaten Batang*”. *Journal of Politic and Government Studies*, (2013). Hlm 48-63.

kelompok masyarakat hingga pada akhirnya dapat mendulang suara partai maupun caleg itu sendiri.

3) Rekrutment Partai

Fungsi partai politik yang berupa rekrutmen politik menjadi perhatian utama bagi Partai - partai, hal ini merupakan suatu usaha untuk mendapatkan kader-kader yang mampu untuk mengangkat perolehan suara partai. Perlu adanya transparansi dalam hal penjangkaran kader yang benar- benar mumpuni untuk dicalonkan tidak berdasarkan kedekatan personal antar pengurus partai atau kepentingan lainnya. Selanjutnya yang harus menjadi perhatian dalam proses rekrutmen kader partai adalah partai harus membuat suatu standar untuk merekrutmen kader, agar kader yang direkrut tidak sembarangan masuk kedalam partai tersebut tentu dari hal tersebut nantinya diharapkan menjadikan partai yang diinginkan oleh masyarakat yang membela kepentingan masyarakat.

4) Sosialisasi Partai

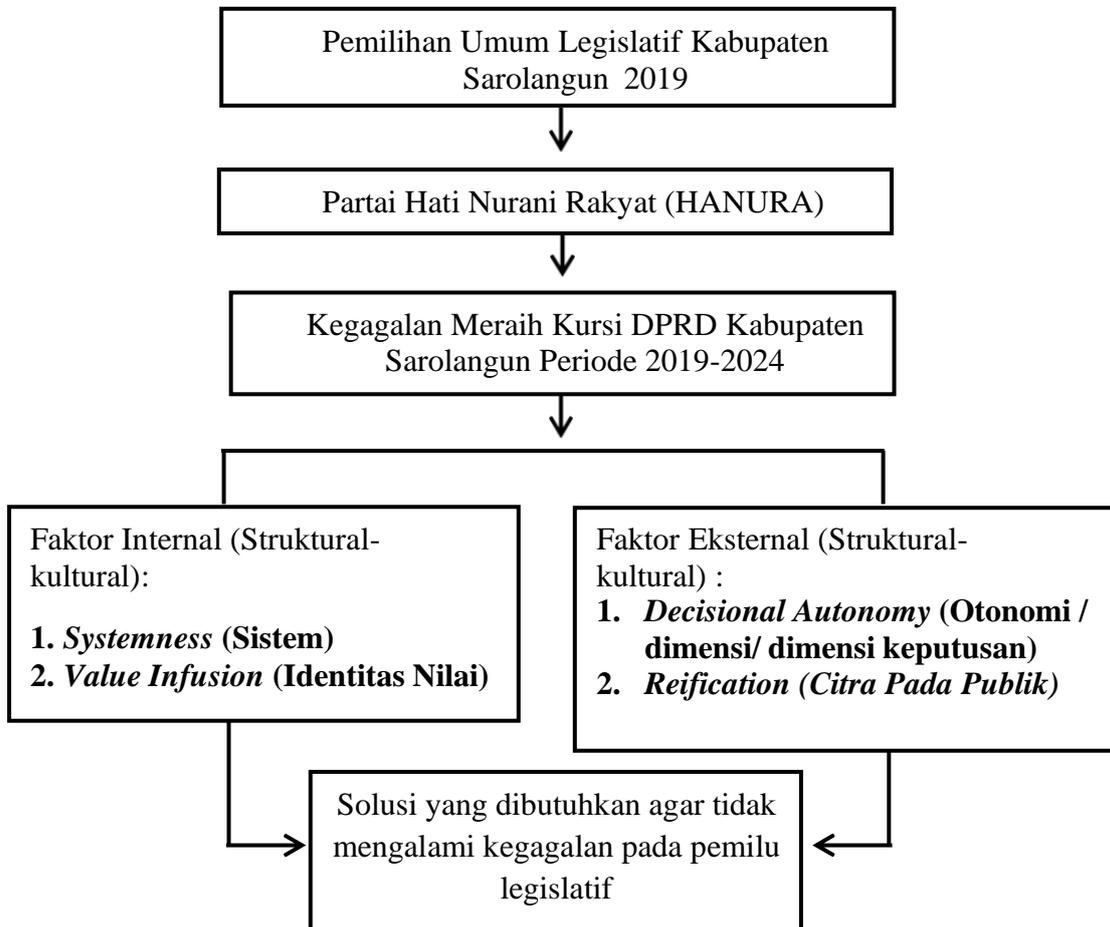
Sosialisasi politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Sosialisasi partai bisa menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan partai dalam pemilihan umum, dengan tidak adanya sosialisasi politik yang terstruktur masyarakat tidak akan mengenal kader kader yang akan diusung oleh suatu partai. Partai harus terus melaksanakan kampanye politik melalui berbagai pendekatan kepada masyarakat seperti

pendidikan politik dan sebagainya dengan tujuan agar kader atau caleg yang diusung terus dikenali masyarakat dan berujung keterpilihan oleh masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi bukan karena partai itu sendiri melainkan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi kegagalan partai politik tersebut, diantaranya perilaku memilih masyarakat, faktor politik uang dan citra partai.

1.6 Kerangka Pikir



Pileg 2019 Kabupaten Sarolangun menjadi awal kekalahan atau kegagalan dari sebuah partai politik yang notabene bukan lah partai politik baru yakni Partai Hanura di Kabupaten Sarolanun, secara khusus dalam penelitian ini penulis beranggapan gagal karena perolehan suara yang minim dan sama sekali tidak mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Sarolangun. Padahal sebelumnya Hanura di sarolangun mampu menaikan hasil perolehan kursinya dari ketika pertama kali mengikuti pemilu pada 2009 lalu dan bahkan Hanura kalah dari parpol baru yang berhasil memperoleh kursi di

DPRD Sarolangun pada pemilu ketiga yang telah diikuti Hanura. Hanura di Sarolangun secara pelembagaan penulis anggap masih lemah. Output dari penelitian ini adalah, nantinya dapat dilihat sebuah solusi untuk partai politik khususnya Hanura pada pemilu legislatif tahun 2019. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi partai-partai yang lain saat ini gagal mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun pada pileg 2019.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah²³. Penelitian survey digunakan untuk melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagiannya. Selanjutnya penelitian naturalistik kualitatif digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah yaitu lapangan dan

²³ Le xy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006. Hlm 6

mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.

1.7.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijabarkan, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis faktor yang melatar belakangi kegagalan partai politik Hanura pada pemilu Kabupaten Sarolangun tahun 2019 yang penulis ditinjau dari perpesktif pelembagaan partai.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sarolangun pada pengurus cabang partai politik Hanura sebagai peserta pileg Kabupaten Sarolangun tahun 2019. Pertimbangan penulis meneliti lokasi ini guna memperoleh keterangan-keterangan informasi dan data yang diperlukan selama penelitian.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari :

a) Data Skunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, Sumber data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, internet dan sebagainya yang dibutuhkan dalam data penelitian yang dilakukan²⁴.

b) Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, Data primer merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian dengan melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melakukan pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti²⁵.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode yang digunakan kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data informan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang

²⁴ *Ibid*, Lexy J. Moleong, Hlm. 132

²⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 209.

situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti²⁶.

Penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan yang peneliti butuhkan terkait objek penelitian ini yang meliputi :

Tabel. 1.7.5
Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan	Alasan
1	Indra Gunawan	Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sarolangun	Mengetahui proses partai Hanura selama pileg 2019
2	Anggota di kepengurusan Partai Hanura Sarolangun (Nama dalam tahap Konfirmasi Ketika Penulis penelitian)	Anggota/staf di kepengurusan Partai Hanura Sarolangun	Memahami dan mengetahui serta pihak yang paling utama di perintah oleh pimpinan Partai
3	Staff KPU	Staff KPU Kabupaten Sarolangun	Mengetahui proses pemilu 2019
4	Dr. Pahrudin	Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UNH Jambi Dan Direktur Eksekutif lembaga survey PUTIN serta Akademisi/Pengamat	Mengetahui pandangan pengamat terkait Partai politik serta apa yang menjadi faktor penyebab kekalahan parpol tersebut pada

²⁶ *Ibid*, Jonathan Sarwono. Hlm, 156

		Politik Provinsi Jambi	pileg 2019
5	Masyarakat	Masyarakat Sarolangun (Tokoh Masyarakat)	Memahami bagaimana presfektif masyarakat mengenai partai Hanura di kalangan masyarakat.

Sumber : Data di olah oleh penulis

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menemukan data, peneliti akan melakukan wawancara, observasi dan kepustakaan/dokumen. Ketiga hal tersebut dibutuhkan untuk menggali informasi dan mendapatkan data sebagai bukti dalam penelitian. Berikut penjelasan teknik pengumpulan data yang peneliti pilih, yaitu :

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang teliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (Reliabilitas dan kesahihan Validasinya)²⁷. Tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini tidak menutupi dirinya selaku peneliti.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

²⁷ Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 52.

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Ada beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur²⁸. Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Juga menggunakan wawancara semi-struktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya²⁹.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto lapangan dalam kegiatan pengumpulan informasi atau data.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman. Dijelaskan dalam buku karya Sugiyono, bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu³⁰.

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian

²⁸ *Ibid*, Jonathan Sarwono. Hlm, 186

²⁹ Op.cit. Sugiyono. Hlm. 233

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 248

data dan penarikan kesimpulan. Reduksi adalah memilih data atau informasi hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian. Penyajian adalah menampilkan atau memaparkan data (informasi) yang diperoleh dalam proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan merupakan proses analisis data atau informasi yang kemudian bermuara pada kesimpulan penelitian.

1.7.8 Keabsahan Data

Triangulasi merupakan metode pengujian keabsahan atau kebenaran suatu data hasil penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda atau bervariasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada³¹.

Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang memanfaatkan beberapa sumber informasi berbeda untuk menguji kebenaran mengenai fenomena di lapangan. Dalam penelitian ini terdapat dua tipe triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Data, yaitu penggunaan beragam sumber data (primer dan sekunder) dalam suatu penelitian.
2. Triangulasi Peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda dalam dalam suatu penelitian.

³¹ *Ibid.* Sugiyono. Hlm. 241